



KR-Surya Adi Lesmana

TETAP NORMAL: Warga Kalitengah Lor Glagaharjo Cangkringan Sleman pulang mencari rumput dari hutan lereng Gunung Merapi, Minggu (7/2). Kegiatan warga mencari pakan untuk ternaknya tetap berjalan normal seiring masih sering terjadinya awan panas guguran maupun lava pijar.

Dewan Minta Waspadaai Longsor di Prambanan

SLEMAN (KR) - DPRD Sleman meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mewaspadaai potensi bencana alam longsor di puncak musim hujan ini. Mengingat Februari ini diprediksi puncak musim hujan.

Sekretaris Komisi A DPRD Sleman Hj Sumaryatin SSos MA menjelaskan, sesuai dengan prediksi dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) DIY, bulan ini merupakan puncak musim hujan. Dewan mengimbau BPBD segera mengambil langkah cepat untuk mewaspadaai potensi longsor di Padukuhon Losari Kalurahan Wukirsari Kapanewon Prambanan.

"Belakangan ini, intensitas hujan cukup tinggi. Sehingga berpotensi menyebabkan terjadinya bencana alam tanah longsor," kata Sumaryatin di kantornya, Senin (8/2).

Langkah pertama yang disarankan, BPBD segera melakukan assesment pa-

da daerah yang tampak gejala tanah longsor. Kemudian pemasangan Early Warning System (EWS) yang disepakati dan disosialisasikan kepada masyarakat untuk mengurangi atau meminimalkan dampak bencana. "Langkah sigap BPBD dalam melakukan mitigasi kebencanaan tanah longsor ini diharapkan akan mengurangi dampak bencana hingga nol persen korban jiwa dan sumber daya lainnya," ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan, kewaspadaan terhadap potensi bencana bisa dilihat dari tanda-tanda di lingkungan sekitar. Sebagai contoh, pada saat terjadi hujan deras dengan durasi yang lama, warga yang tinggal di daerah rawan longsor harus waspada akan bencana. Kalau perlu untuk sementara mengungsi ke tempat yang lebih aman. "Kami berharap adanya mitigasi ini, maka dampak dari bencana bisa ditekan sekecil mungkin," ujar Sumaryatin. **(Sni) -f**

POLDA DIY SIAP DUKUNG PPKM MIKRO

Tekan Covid-19, Bupati Minta Padukuhun Lebih Proaktif

SLEMAN (KR) - Bupati Sleman Sri Purnomo menilai kebijakan Pembatasan secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PTKM) yang saat ini dilaksanakan sudah bisa menekan pertumbuhan jumlah positif Covid-19. Agar lebih menekan penyebaran Covid-19, Bupati meminta masing-masing lebih proaktif.

"PTKM yang diberlakukan di Sleman saya nilai cukup efektif. Meskipun ada penambahan, tapi sudah tidak setinggi sebelumnya," kata Sri Purnomo di Sleman, Senin (8/2).

Menurutnya, sekarang ini pertumbuhan penderita Covid-19 sudah semakin menurun. Sedangkan untuk penderita yang sudah sembuh juga semakin meningkat. "Pada 29-31 Januari kemarin, positifnya menurun dan sembuh tinggi. Mudah-mudahan dengan PTKM jilid ketiga ini juga semakin membaik," ucapnya.

Selama kebijakan PTKM, Pemkab Sleman telah menegakkan sanksi ter-

hadap masyarakat yang melanggar. Bahkan tempat usaha yang membandel, telah dilakukan tindakan yang tegas. "Bahkan kemarin sudah ada tempat usaha yang ditutup sementara karena melanggar. Semua ini dilakukan demi kebaikan kita bersama dalam mencegah penularan Covid-19," tegasnya.

Bupati juga meminta kepada masyarakat yang ada di padukuhun lebih proaktif dalam mencegah penyebaran Covid-19. Mengingat sekarang ini penyebaran Covid-19 sudah ada yang klaster keluarga. "Ruang gerak penyebaran Covid-19 harus diperkecil lagi. Salah satunya masing-masing padukuhun lebih getol da-

lam pemberatasan Covid-19. Kalau itu dilaksanakan, saya yakin penyebaran virus bisa lebih ditekan," terangnya.

Di samping itu, masyarakat juga harus menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Yakni menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. "Kesadaran masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan harus ditingkatkan," ujarnya.

Sementara terkait mulai diterapkannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro, Polda DIY menegaskan mendukung dan mensosialisasikan pemberlakuan PPKM. "DIY termasuk dalam prioritas yang diinstruksikan menerapkan PPKM mikro. Untuk itu, Polda DIY akan mendukung dengan turut mensosialisasikan penerapan PPKM mikro dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian hingga tingkat

RT," ujar Kabid Humas Polda DIY Kombes Pol Yuliyanto SIK dalam keterangan persnya, Senin (8/2).

Diungkapkan, pemberlakuan PPKM mikro yang berlaku hingga 22 Februari 2021 tersebut tertuang pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021. Pada zona hijau di mana tidak ada kasus aktif di tingkat RT, dilakukan tes pada suspek secara aktif. Lalu pada zona kuning disebarkan bila terdapat 1 rumah hingga 5 rumah dengan kasus positif Covid-19 selama 7 hari terakhir di haruskan melakukan pelacakan kontak erat. Kemudian, pada zona oranye disebarkan bila terdapat 6 rumah hingga 10 rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam 7 hari terakhir. Penanganan yang dilakukan adalah dengan pelacakan kontak erat dan menutup rumah ibadah, tempat bermain anak, serta tempat umum lainnya kecuali sektor esensial.

Terakhir, kawasan zona merah ditetap-

kan bila terdapat lebih dari 10 rumah dengan kasus positif. Pada zona tersebut baru diterapkan PPKM tingkat RT yang mencakup pelacakan kontak erat, isolasi mandiri, menutup tempat umum kecuali sektor esensial, melarang kerumunan lebih dari 3 orang, membatasi akses maksimal pukul 20.00, serta meniadakan kegiatan sosial masyarakat.

Kombes Yuliyanto menambahkan, Gubernur DIY Sri Sultan HB X akan mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur untuk mendorong penerapan PPKM mikro. Selain itu Pemda DIY juga menggalakkan semboyan Jogo Wargo yang bertujuan agar warga DIY saling menjaga satu sama lain sehingga tidak tertular ataupun menulari Covid-19. "Kami berharap adanya kesadaran bersama dari semua pihak untuk mematuhi kebijakan pemerintah dalam upaya penanggulangan Covid-19," pungkasnya. **(Sni/Ayu)-f**

Kantor Baru Bupati Tinggal Pembinaan

SLEMAN (KR) - Gedung perkantoran baru yang akan ditempati Bupati dan Wakil Bupati Sleman terpilih secara makro sudah siap digunakan. Namun secara mikro masih ada yang harus dibenahi sebelum ditempati pejabat baru nantinya.

Untuk mengecek kesiapan kantor baru tersebut, Bupati Sri Purnomo dan Wakil Bupati Sri Muslimatun meninjau hasil pembangunan gedung baru di utara kompleks Kantor Sekretariat Daerah Sleman, Senin (8/2). Bupati bersama jajarannya menelusuri tiap lantai bangunan untuk meninjau setiap ruang dan fasilitas yang ada.

Gedung ini rencananya difungsikan sebagai kantor Bupati dan Wakil Bupati terpilih, Sekda, Asekda dan Staf Ahli mulai tahun 2021. "Secara makro sudah selesai, namun secara mikro



KR-Istimewa

Bupati mengecek hasil pembangunan gedung baru.

masih ada yang harus dibenahi seperti kaca yang kurang siku dan beberapa besi yang sedikit berkarat untuk dicat lagi. Jadi nanti ketika akan dipakai kondisinya sudah bagus dan siap 100 persen," ujar Bupati.

Sementara itu Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP)

Sleman Taufiq Wahyudi menjelaskan, gedung tersebut memiliki luas lebih kurang 4.100 meter persegi yang dibangun di atas tanah seluas 4.300 meter persegi. "Pembangunan gedung ini melalui dua tahap. Tahap pertama menghabiskan biaya Rp 15 miliar dan tahap kedua sebesar Rp 28,6 miliar," jelasnya. **(Has)-f**

Harda, Ketua Badan Pengelola Masjid Agung



KR-Istimewa

Bupati menyerahkan SK kepada Harda Kiswaya

SLEMAN (KR) - Bupati Sleman Sri Purnomo mengukuhkan Badan Pengelola Masjid Agung dr Wahidin Soediro Hoesodo Periode 2020-2023 dan Pengurus LPTQ Kabupaten Sleman Periode 2020-2025 di Pendapa Paramsamya, Senin (8/2). Pengukuhan ditandai dengan penyerahan secara simbolis Surat Keputusan Bupati Sleman.

Sekda Sleman Harda Kiswaya dilantik sebagai Ketua Pengurus Badan

Pengelola Masjid Agung beserta 33 orang pengurus. Sedangkan Muhsin Kalida dilantik sebagai Ketua Pengurus LPTQ Sleman beserta 34 orang pengurus.

Bupati berharap setelah dikukuhkan, Badan Pengelola Masjid Agung dapat menyusun perencanaan yang matang dan manajemen yang baik serta memiliki komitmen yang kuat demi keberhasilan pengembangan Masjid Agung dr. Wahidin Soediro Hoesodo ke

depannya. "Saya harapkan Masjid Agung dr Wahidin Soediro Hoesodo di bawah badan pengelola yang baru mampu berperan secara aktif dalam memberdayakan umat disekitarnya. Dana yang dimiliki oleh Masjid Agung dimanfaatkan untuk memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan umat," pesannya.

Sementara itu untuk Pengurus LPTQ Kabupaten Sleman diminta semakin meneguhkan semangat dan komitmen untuk semakin membunikan Alquran di tengah-tengah umat Islam di Kabupaten Sleman. "Eksistensi LPTQ itu sejatinya bukan sekadar wadah pengembangan Tilawatil Quran semata. Keberadaan LPTQ juga merupakan sarana yang sangat potensial untuk menyebarkan agama Islam dan membina mental spiritual umat," kata Bupati. **(Has)-f**

Kedaulatan Rakyat
EPAPER
www.kr.co.id

Berlangganan Scan Barcode

Harian Kedaulatan Rakyat juga hadir dalam format koran digital atau electronic paper (epaper). Sajian berita-berita Kedaulatan Rakyat dapat Anda nikmati melalui genggaman tangan Anda. Sekarang.